

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DI KABUPATEN CIAMIS

Irfan Nursetiawan^{1*}, Rifki Agung Kusuma Putra²
^{1,2} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi: irfan_nursetiawan10@unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *e-governance* dalam pengembangan *smart village* di Kabupaten Ciamis yang berada di 27 kecamatan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat desa. Adapun jumlah lokus penelitian hanya berada di 3 desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, yakni Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti, Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya dan Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-governance* telah memberikan kontribusi signifikan dalam digitalisasi layanan administrasi desa, percepatan akses informasi, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa. Sebanyak 86,05% telah menerapkan digitalisasi desa. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Pengembangan *smart village* memerlukan integrasi antara teknologi, tata kelola yang adaptif, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital, serta dukungan kebijakan yang konsisten guna mengoptimalkan implementasi *e-governance* di tingkat desa.

Kata kunci: e-governance; smart village; pelayanan publik; transformasi digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of e-governance implementation in developing smart villages in Ciamis Regency, which is located in 27 sub-districts, with a focus on improving the quality of public services, transparency, and village community participation. The number of research loci is only in 3 villages in the Ciamis Regency area, namely Sukamaju Village, Cihaurbeuti District, Tanjungsari Village, Sadananya District, and Dewasari Village, Cijeungjing District. The approach used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies of village governments and related stakeholders. The results of the study indicate that the implementation of e-governance has made a significant contribution to the digitalization of village administration services, accelerated access to information, and increased accountability of village government. A total of 86.05% have implemented village digitalization. However, its effectiveness still faces obstacles such as limited technological infrastructure, human resource capacity, and low digital literacy of the community. The development of smart villages requires the integration of technology,

adaptive governance, and sustainable community empowerment. Therefore, strategies are needed to strengthen institutional capacity, improve digital literacy, and provide consistent policy support to optimize e-governance implementation at the village level.

Keywords: *e-governance; smart village; public service; digital transformation.*

A. PENDAHULUAN

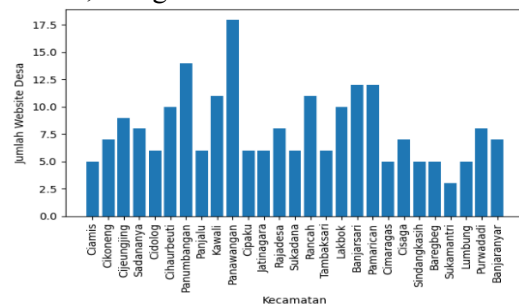
Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan *e-governance* tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berbasis wilayah, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mengakselerasi transformasi digital melalui pengembangan konsep *smart village* (Manapa Sampetoding & Er, 2024).

Konsep *smart village* mengintegrasikan teknologi digital dengan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dalam aspek pelayanan publik, ekonomi, maupun partisipasi sosial. Implementasi *e-governance* menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa cerdas, karena mampu mendukung sistem administrasi yang efisien, akses informasi yang terbuka, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Heripracoyo, 2026; Kaiser, 2024). Dengan demikian, sinergi antara *e-governance* dan *smart village* menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola desa yang adaptif dan inovatif.

Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu daerah yang terus mendorong digitalisasi pemerintahan desa, telah menginisiasi berbagai program berbasis

teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup pengembangan sistem informasi desa, digitalisasi layanan administrasi, serta pemanfaatan *platform* digital dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi *e-governance* di tingkat desa antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat. Selain itu, aspek kelembagaan dan dukungan kebijakan juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan *smart village* (Hadian et al., 2025; Stojanova et al., 2021). Ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun data *website* desa di Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:



Gambar. 1 Data Website Desa di Kabupaten Ciamis tahun 2024

Sumber: Diskominfo Kab. Ciamis, 2025.

Data tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat adopsi *website* desa antarkecamatan di Kabupaten Ciamis sebagai indikator awal implementasi *e-governance* menuju *smart village*. Kecamatan seperti Panawangan, Kawali, Panumbangan, dan Banjarsari terlihat memiliki jumlah *website* desa yang relatif tinggi, yang mengindikasikan kesiapan infrastruktur digital, kapasitas kelembagaan, serta komitmen pemerintah desa dalam mengadopsi layanan berbasis teknologi. Sebaliknya, kecamatan seperti Sukamantri, Sindangkasih, dan beberapa wilayah lainnya masih menunjukkan jumlah yang rendah, mencerminkan adanya kesenjangan digital yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun literasi digital masyarakat.

Pola ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi *e-governance* belum merata, sehingga pengembangan *smart village* memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, khususnya dalam penguatan kapasitas desa dan pemerataan akses teknologi informasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menghubungkan *e-governance* dengan pilar *smart village* secara operasional di tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya mengkaji digitalisasi layanan, tetapi juga menilai kontribusinya terhadap tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan inovatif. Selain itu, pendekatan empiris berbasis konteks Kabupaten Ciamis memperkuat kebaruan melalui analisis kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan pemanfaatannya, sehingga menghasilkan model evaluasi efektivitas yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Selain itu, *novelty* penelitian ini

terletak pada fokus analisis yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara implementasi *e-governance* dan pengembangan *smart village* di Kabupaten Ciamis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis evaluasi efektivitas. Sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, yakni *e-governance*, *smart village*, dan pengukuran efektivitas berbasis dimensi *input*, proses, *output*, dan outcome dalam konteks lokal Kabupaten Ciamis. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas digitalisasi desa atau *e-government* secara parsial tanpa mengaitkannya dengan kerangka *smart village* dan tanpa menggunakan pendekatan evaluatif yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model analisis yang lebih terintegrasi dan kontekstual, sekaligus memperkaya kajian pemerintahan digital di tingkat desa dengan evidensi empiris yang berbasis pada realitas implementasi di lapangan dan penelitian sebelumnya yang belum membahas *e-governance* di tingkat perdesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas implementasi *e-governance* dalam pengembangan *smart village* di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai capaian, kendala, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *e-governance* di tingkat desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam mendorong terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa yang berbasis digital, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: Bagaimana efektivitas implementasi *e-governance* dalam pengembangan smart village di Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi *e-governance* dalam pengembangan *smart village* di Kabupaten Ciamis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami fenomena secara kontekstual, terutama terkait proses, dinamika, serta interaksi antar aktor dalam penerapan teknologi digital di tingkat desa.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 17 (tujuh belas) informan, yang terdiri dari Kepala Desa 3 orang, Operator Website Desa 3 orang, Perangkat Desa 3 orang, Masyarakat 6 orang, dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis 2 orang. Fokus penelitian diarahkan pada aspek tata kelola, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam kerangka transformasi digital desa. Metode penelitian menggunakan kualitatif sebagai landasan dalam mendapatkan informasi yang relevan (Busetto et al., 2020; Wolcott, 2020). Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2025 dan lokus penelitian hanya berada di 3 desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, yakni Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, dan Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam melalui

pedoman wawancara, observasi lapangan yang mengacu pada lembar observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, program, serta platform digital desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait kondisi faktual di lapangan (Bans Akutey & Tiimub, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi *e-governance* dalam mendukung pengembangan *smart village* di tingkat desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-governance* di Kabupaten Ciamis telah mencapai tingkat efektivitas yang cukup optimal dalam mendukung pengembangan *smart village*. Hal ini tercermin dari meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya melalui penggunaan *website* desa sebagai media pelayanan publik, diseminasi informasi, dan transparansi anggaran. Digitalisasi desa telah mendorong perubahan pola layanan dari konvensional menjadi berbasis elektronik, sehingga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat (Devianty et al., 2025; Rukmawati et al., 2024; Suwarjo, 2025).

Dalam perspektif *smart village*, implementasi *e-governance* di Ciamis

menunjukkan adanya integrasi awal antara teknologi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa mulai mengoptimalkan sistem informasi desa untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven governance*), serta memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *smart governance* yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa berbasis digital.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh desa. Salah satu hambatan utama terletak pada kompetensi digital dari operator *website* desa yang masih bervariasi. Keterbatasan kemampuan teknis dalam pengelolaan konten, pemutakhiran data, dan pemanfaatan fitur sistem informasi menyebabkan belum optimalnya fungsi *website* sebagai sarana pelayanan publik digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola sistem (Agusta, 2023; Widjayanti et al., 2025).

Aksesibilitas teknologi informasi juga menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan *smart village* (Patnaik et al., 2020). Beberapa desa masih menghadapi keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur pendukung lainnya, yang berdampak pada rendahnya intensitas penggunaan layanan digital oleh masyarakat. Di sisi lain, tingkat validitas dan aktualisasi data yang ditampilkan dalam sistem informasi desa juga menjadi isu penting, karena data yang tidak mutakhir dapat mengurangi kepercayaan

publik serta menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Implementasi e-governance dalam pengembangan smart village di Kabupaten Ciamis menunjukkan capaian yang beragam apabila dianalisis menggunakan indikator efektivitas yang terukur, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Pada aspek input, sebagian besar desa telah memiliki dukungan infrastruktur dasar seperti perangkat komputer dan jaringan internet, meskipun kualitas dan stabilitasnya belum merata. Salah satu informan dari unsur pemerintah desa menyatakan bahwa "*fasilitas sudah ada, tapi kadang jaringan tidak stabil, jadi pelayanan online sering kembali ke manual.*" Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya menjamin optimalnya implementasi e-governance.

Pada dimensi proses, efektivitas implementasi ditentukan oleh sejauh mana sistem digital benar-benar digunakan dalam praktik pelayanan publik. Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi intensitas pemanfaatan sistem informasi desa. Operator desa di salah satu lokasi penelitian mengungkapkan bahwa "*aplikasi sudah disediakan, tetapi tidak semua perangkat desa terbiasa menggunakannya, sehingga masih bergantung pada satu operator.*" Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam menentukan keberlangsungan proses digitalisasi, sekaligus menjadi indikator bahwa efektivitas belum sepenuhnya tercapai secara kolektif dalam organisasi desa.

Selanjutnya pada dimensi *output*, ukuran efektivitas dapat dilihat dari jenis dan jumlah layanan digital yang tersedia

serta tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Beberapa desa telah mampu menyediakan layanan administrasi berbasis online seperti pembuatan surat keterangan secara digital. Namun demikian, tingkat penggunaan oleh masyarakat masih terbatas. Seorang warga menyampaikan bahwa *“lebih sering datang langsung ke kantor desa karena belum terbiasa menggunakan layanan online.”* Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan (*output*) dan tingkat adopsi oleh pengguna, sehingga efektivitas belum dapat dikategorikan sebagai optimal.

Pada dimensi *outcome*, efektivitas diukur melalui dampak yang dirasakan, seperti peningkatan efisiensi pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa dengan tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan kecepatan pelayanan. Sebaliknya, pada desa dengan adopsi rendah, manfaat tersebut belum dirasakan secara signifikan. Informan dari pihak kecamatan menyatakan bahwa *“desa yang sudah aktif digital pelayanannya lebih cepat, tapi yang lain masih perlu pendampingan.”* Dengan demikian, klaim efektivitas harus dilihat secara diferensial, bukan sebagai kondisi yang seragam di seluruh desa.

Perbedaan tingkat efektivitas tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara desa yang tergolong maju secara digital dengan desa yang masih tertinggal. Desa maju umumnya ditandai dengan kepemimpinan yang adaptif, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, serta dukungan infrastruktur yang relatif stabil. Sebaliknya, desa tertinggal menghadapi keterbatasan pada aspek tersebut, sehingga

implementasi *e-governance* berjalan lambat. Salah satu informan menyebutkan bahwa *“perbedaan desa itu terlihat dari kemampuan SDM-nya, kalau ada operator yang paham, programnya jalan.”* Kondisi ini menegaskan bahwa kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan smart village.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, efektivitas implementasi *e-governance* di Kabupaten Ciamis dapat dikategorikan “cukup efektif” secara parsial, yaitu efektif pada desa dengan tingkat kesiapan tinggi, namun belum efektif secara menyeluruh. Penilaian ini didasarkan pada indikator yang jelas, yakni keterpenuhan input, kelancaran proses, capaian output layanan digital, serta outcome berupa efisiensi dan kepuasan masyarakat. Walaupun demikian, penggunaan istilah “cukup efektif” bukan merupakan klaim normatif, melainkan hasil evaluasi berbasis indikator empiris yang menunjukkan adanya variasi capaian antar daerah.

Secara keseluruhan, digitalisasi desa di Kabupaten Ciamis melalui implementasi *e-governance* telah menunjukkan arah yang positif dalam mewujudkan *smart village*. Namun, untuk meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kualitas pengelolaan data desa.

Sinergi antara teknologi, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan guna menciptakan ekosistem desa digital yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Transformasi digital merupakan langkah yang tepat dalam pengembangan pelayanan publik (Sarwar et al., 2023). Infrastruktur digital juga tidak

terlepas sebagai pendukung dalam ekosistem pelayanan digital di tingkat perdesaan.

1. *E-Governance*

Pengembangan *e-governance* menunjukkan bahwa implementasinya di tingkat desa Kabupaten Ciamis telah berjalan cukup efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemanfaatan website desa dan sistem informasi desa telah meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Layanan yang sebelumnya bersifat manual kini mulai bertransformasi menjadi berbasis elektronik, sehingga mempercepat proses pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik (Xu & Tang, 2020). Namun demikian, efektivitas *e-governance* masih dipengaruhi oleh kompetensi digital aparatur desa, khususnya operator *website*, yang belum merata. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan konten, pemutakhiran data, serta pemanfaatan fitur layanan digital secara maksimal.

2. *Smart Village*

Dalam konteks *smart village*, implementasi *e-governance* di Kabupaten Ciamis telah menjadi fondasi dalam membangun tata kelola desa yang cerdas (Patnaik et al., 2020). Integrasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mendorong terciptanya sistem yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam memperoleh informasi desa secara *real-time*, serta terbukanya ruang partisipasi melalui platform komunikasi daring (van Es & Poell, 2020).

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pemerintah desa

untuk mengelola data secara lebih sistematis dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Mao et al., 2024).

Adapun faktor pendukung dalam penerapan *smart village* di Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:



Gambar. 2 Faktor Pendukung Smart Village di Kabupaten Ciamis

Sumber: Hasil Penelitian, 2025.

Website desa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat (Klochan et al., 2021). Meskipun demikian, pengembangan *smart village* masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antar desa, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat agar implementasi *smart village* dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

3. Transformasi Digital

Transformasi digital desa di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tata kelola konvensional menuju tata kelola berbasis teknologi. Proses ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam pelayanan publik, pengelolaan data desa, serta komunikasi pemerintahan (Purbantara et al., 2021). Transformasi ini tidak hanya berimplikasi pada efisiensi layanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision-making*).

Keberhasilan transformasi digital masih dihadapkan pada kendala aksesibilitas teknologi informasi dan validitas data yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur, serta standarisasi pengelolaan data guna memastikan transformasi digital desa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan transformasi digital pada tingkat desa masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan aksesibilitas teknologi informasi serta belum optimalnya validitas data. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara adopsi teknologi dan kesiapan ekosistem digital, khususnya dalam aspek infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola data. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta standarisasi pengelolaan data berbasis prinsip interoperabilitas dan akuntabilitas, guna memastikan bahwa transformasi digital desa dapat berlangsung secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-governance* dalam pengembangan *smart village* di Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup efektif, ditandai dengan tingginya tingkat adopsi digitalisasi desa namun belum diikuti oleh optimalisasi pada dimensi proses dan outcome akibat keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan literasi digital masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain hanya mencakup tiga desa sebagai lokus studi sehingga belum merepresentasikan seluruh kondisi desa di Kabupaten Ciamis, serta belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi dari implementasi *smart village* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bersama DPMD Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu 1–2 tahun menyusun program penguatan infrastruktur digital desa berbasis prioritas wilayah blank spot dengan target peningkatan kualitas jaringan minimal pada 90% desa; (2) Pemerintah Desa secara bertahap dalam 1 tahun meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis pengelolaan sistem informasi desa dengan target minimal 2 operator kompeten per desa; serta (3) pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal dalam kurun waktu 6–12 bulan menyelenggarakan program literasi digital masyarakat secara masif dengan target peningkatan penggunaan layanan digital desa oleh masyarakat hingga minimal 60%. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas

implementasi e-governance yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agusta, Y. (2023). Managing the Development of a Sustainable Digital Village. *Sustainability (Switzerland)*, 15(9).
<https://doi.org/10.3390/su15097575>
- Bans Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in Research. *Academia Letters*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20935/AL3392>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. In *Neurological Research and Practice* (Vol. 2, Number 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Devianty, T., Hastika, N., & Santosa, P. (2025). Smart Village Concept And Improvement Of Public Services In Indonesia. *JLPH*, 6(2), 1360–1367.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2>
- Hadian, N., Purwanto, P., & Wibowo, A. (2025). Identification and validation of factors affecting the success of smart village services. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 14(1), 676–686.
<https://doi.org/10.11591/eei.v14i1.8022>
- Heripracoyo, S. (2026). Information Management As A Catalyst For Smart Village Transformation. *Architecture Image Studies*, 7(1), 1472–1483.
<https://doi.org/10.62754/ais.v7i1.1051>
- Kaiser, Z. R. M. A. (2024). Smart governance for smart cities and nations. *Journal of Economy and Technology*, 2, 216–234.
<https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.07.003>
- Kloch, V., Piliaiev, I., Sydorenko, T., Khomutenko, V., Solomko, A., & Tkachuk, A. (2021). Digital platforms as a tool for the transformation of strategic consulting in public administration. *Journal of Information Technology Management*, 13, 42–61.
<https://doi.org/10.22059/JITM.2021.80736>
- Manapa Sampetoding, E. A., & Er, M. (2024). Digital Transformation of Smart Village: A Systematic Literature Review. *Procedia Computer Science*, 239, 1336–1343.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.304>
- Mao, Z., Zhu, X., Zou, Q., & Jin, W. (2024). How Can Digital Villages Improve Basic Public Services Delivery in Rural Areas? Evidence from 1840 Counties in China. *Agriculture (Switzerland)*, 14(10).
<https://doi.org/10.3390/agriculture14101802>
- Patnaik, S., Sen, S., & Mahmoud, M. S. (2020). *Modeling and Optimization in Science and Technologies Smart Village Technology Concepts and Developments*.
<http://www.springer.com/series/10577>
- Purbantara, A., Mujianto, & Rahmawati, E. (2021). Pengembangan Daya Saing Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Serta Transmigrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Bisnis*, 26(3), 278–292.
<https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.3666>
- Rukmawati, D., Putu, I., & Pradnyana, H. (2024). The Dynamics of Digital Transformation in Celuk Village: Opportunities, Challenges, and Readiness. *JGLP*, 6(2), 204–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1565>
- Sarwar, M. I., Abbas, Q., Alyas, T., Alzahrani, A., Alghamdi, T., & Alsaawy, Y. (2023). Digital Transformation of Public Sector Governance With IT Service Management-A Pilot Study. In *IEEE Access* (Vol. 11, pp. 6490–6512). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3237550>
- Stojanova, S., Lentini, G., Niederer, P., Egger, T., Cvar, N., Kos, A., & Duh, E. S. (2021). Smart villages policies: Past, present and future. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 13, Number 4, pp. 1–28). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/su13041663>
- Suwarjo, S. (2025). Smart Village: An Effort to Implement District Digitalization to Support Public Services in Pleret Kapanewon Pleret District Bantul District. *POPULIKA*, 13(1), 14–21. <https://doi.org/10.37631/populika.v13i1.1661>
- van Es, K., & Poell, T. (2020). Platform Imaginaries and Dutch Public Service Media. *Social Media and Society*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2056305120933289>
- Widjayanti, A., Wibowo, E. K., Handayani, H., & Denishwara, R. (2025). Village Capacity Development (Study of Banjarsari Sub-district, Lebak Regency). *KnE Social Sciences*, 10(15), 519–533. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19211>
- Xu, C. K., & Tang, T. (2020). Closing the Gap or Widening the Divide: The Impacts of Technology-Enabled Coproduction on Equity in Public Service Delivery. *Public Administration Review*, 80(6), 962–975. <https://doi.org/10.1111/puar.13222>